

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur Jawa Barat sebagai Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 kepada masyarakat. Penyampaian ringkasan LPPD ini sekaligus juga untuk melaksanakan amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Melalui Penyampaian Informasi kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2017 tersebut diharapkan dapat diperoleh masukan dan saran untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat ke depan.

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah daratan seluas 38.126,54 km² dengan garis pantai sepanjang 724,85 km. Secara Geografis Provinsi Jawa Barat terletak pada posisi 104°48" - 108°48" Bujur Timur dan 5°50" - 7°50" Lintang Selatan, dengan Jumlah penduduk mencapai sebanyak 47.379.389 jiwa.

Secara administratif pemerintahan, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 Kota, yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Pangandaran serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Kota Banjar.

III. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN MISI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

Misi Pertama : "Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing", dilaksanakan melalui :

- **Urusan Pendidikan.** keberhasilan di bidang pendidikan pada Tahun 2017 ditunjukkan oleh capaian : (1) Indeks Pendidikan sebesar 62,19 poin dari target 62,11 poin; (2) angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,02 tahun; (3) Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah mencapai 81,25 persen atau meningkat 13,69 persen dari capaian Tahun 2016 sebesar 67,56 persen, APK pendidikan tinggi pada Tahun 2016/2017 mencapai 19,19 persen; serta Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk usia sekolah masyarakat Jawa Barat 12,76 tahun. Keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan tersebut sebagai implementasi dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap peningkatan kualitas pendidikan melalui alokasi pembiayaan minimal sebesar 20 persen dari total APBD yang dialokasikan untuk: Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MA sebesar 1.400.000/siswa/tahun, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk SMA/SMK/MA Negeri, Swasta dan pesantren sebanyak 1.574 ruang, Ruang Kelas Baru PTS sebanyak 300 ruang, dan pemberian beasiswa untuk 4.640 siswa dari target 5.000 siswa serta merealisasikan *Digital Smart School* di 217 sekolah dari target 100 sekolah.
- **Urusan Kesehatan,** keberhasilan pembangunan pada Tahun 2017 adalah : Tercapainya indeks kesehatan sebesar 81,18 poin yang meningkat dibanding capaian Tahun 2016 sebesar 80,68 poin; Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 72,77 tahun meningkat dibandingkan capaian Tahun 2016 sebesar 72,44 tahun. Pelayanan Kesehatan yang ditunjukkan oleh Ratio Kematian Ibu mencapai 77,83 per 100.000 Kelahiran

Hidup; Ratio Kematian Bayi mencapai 3,63 per 1000 Kelahiran Hidup. Keberhasilan tersebut dicapai melalui program : (1) Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, dengan capaian Desa/kelurahan yang telah melaksanakan imunisasi untuk anak-anak melalui program *Universal Child Immunisation* mencapai 89,9 persen; dalam rangka penanggulangan penyakit Tuberculosis (TB) telah dilakukan Program *Treatment Succes Rate* Tuberculosis (TB) di setiap kabupaten/kota untuk menanggulangi penyakit TB mencapai 86,02 persen dari usia rentan TB; sebesar 95,25 persen dari puskesmas di Jawa Barat telah melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa; (2) Pengembangan Lingkungan Sehat yang ditunjukkan oleh: Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas sebesar 64,84 persen; Penduduk yang menggunakan Jamban Sehat sebesar 67,95 persen; (3) Promosi Kesehatan yang ditunjukkan oleh Rumah Tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mencapai 58,1persen; Desa Siaga Aktif mencapai 97,65 persen dari target 84 persen; (4) Sumber Daya Kesehatan yang ditunjukkan oleh : Puskesmas yang sudah Terakreditasi mencapai 298 puskesmas dari target 70 puskesmas; Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi mencapai 87 Rumah Sakit dari target 80 Rumah Sakit; Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sesuai standar mencapai 88 Rumah Sakit dari target 40 Rumah Sakit; Ketersediaan Obat Esensial di Instalasi Farmasi kabupaten/kota mencapai 88,47 persen dari target 85 persen; Penduduk yang telah memiliki Jaminan Kesehatan mencapai 71,62 persen.

- **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**, pada Tahun 2017 dilaksanakan melalui Program : (1) Pelayanan Keluarga Berencana yang ditunjukkan oleh *Total Fertility Rate* sebesar 2,4 poin dan peserta KB aktif sebesar 74,91 persen dari target 63,75 persen; (2) Pendewasaan Usia Perkawinan yang ditunjukkan oleh rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW) sebesar 19,60 tahun; (3) Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang ditunjukkan oleh menurunnya keluarga pra sejahtera sebanyak 1.083.117 keluarga.
- **Urusan Ketransmigrasian**, pada Tahun 2017 dilaksanakan melalui : (1) pengembangan program transmigrasi, dan layanan ketransmigrasian, yang berhasil mengirim transmigrasi ke luar pulau Jawa sebanyak 63 orang; (2) Telah dibuat Kesepakatan Bersama/ *MoU* antara Provinsi Jawa Barat selaku daerah pengirim dengan Provinsi daerah penerima sebanyak 11 MoU.

Misi Kedua : "Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan", diwujudkan melalui :

- **Urusan Pangan**, pada Tahun 2017 dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang berhasil menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah sebesar 916,54 ton dari target sebesar 500 ton, penyediaan informasi harga pangan yang dapat diakses oleh masyarakat sebesar 123,41 persen dari target 100 persen, meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan untuk menjamin ketersediaan pangan sebesar 84,3 poin dari target 80 poin, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan telah dilakukan terhadap produsen pangan olahan sebesar 100 persen dari target 85 persen, serta desa rawan pangan telah ditangani dengan baik sebesar 44,65 persen dari target 40 persen.
- **Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**, pada Tahun 2017 dilaksanakan melalui Program : (1) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah yang ditunjukan oleh terciptanya wirausahaan baru dengan capaian wirausaha baru sebanyak 46.887 orang dari target sebanyak 20.000 orang; (2) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ditunjukan oleh penerima manfaat kredit modal usaha sebesar 11.996 orang dari target sebesar 7.750 orang; (3) Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif melalui penerbitan legalitas usaha bagi 1.523 orang pelaku UMKM dari target sebanyak 320 orang; (4) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan capaian koperasi aktif sebanyak 16.967 koperasi dari target sebanyak 16.878 koperasi.
- **Urusan Penanaman Modal**, pada Tahun 2017 dilaksanakan melalui Program : (1) Peningkatan Investasi Daerah dengan capaian nilai investasi PMA/PMDN sebesar 162,72 trilyun rupiah dari target sebesar 138,85 trilyun rupiah; (2) Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian indeks kepuasan masyarakat dengan capaian B.

- Urusan Kelautan dan Perikanan**, pada Tahun 2017 dilaksanakan melalui Program : (1) Pengembangan Budidaya Perikanan dengan capaian peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 1,54 persen, peningkatan produksi perikanan non konsumsi sebesar 24,53 persen dari target sebesar 2 persen, kontribusi terhadap pemenuhan benih Ikan Nila nasional sebesar 68,59 persen dari target sebesar 50 persen, benih Ikan Mas nasional sebesar 325,15 persen dari target 50 persen, kontribusi terhadap pemenuhan benih Ikan Lele nasional sebesar 64,47 persen dari target sebesar 10 persen dan kontribusi terhadap pemenuhan benih Ikan Patin nasional sebesar 45,47 persen dari target sebesar 10 persen; (2) Pengembangan Perikanan Tangkap yang ditunjukkan oleh produksi perikanan tangkap sebesar 216.893,25 ton atau 91,68 persen dari target realisasi. Penurunan produksi perikanan tangkap di Pantura Jawa Barat merupakan dampak dari diberlakukannya Permen KP Nomor 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, salah satunya tentang larangan penggunaan API Pukat hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Pantura Jawa Barat pada Tahun 2017 yang mengakibatkan terjadi penurunan jumlah trip penangkapan ikan sebesar 0,76 persen dari Tahun 2016. (3) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang ditunjukkan oleh penurunan kasus pelanggaran sector kelautan dan perikanan sebesar 41,34 persen dari target sebesar 25 persen dan penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu sebesar 100 persen dari target sebesar 75 persen; (4) Pemasaran, Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditunjukkan oleh produksi kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan sebesar 96,14 persen dari target sebesar 89 persen, peningkatan produksi olahan sebesar 12,05 persen dari target sebesar 10 persen, konsumsi ikan sebesar 27,70 persen dari target sebesar 26,85 persen dan peningkatan produksi garam sebesar 6.120,12 persen dari target 5 persen; (5) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang ditunjukkan oleh pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap 1 kawasan dari target sebesar 1 kawasan, luas kawasan rehabilitasi dan revitalisasi ekosistem pesisir, laut, pulau-pulau kecil dan perairan umum sebesar 280 ha dari target sebesar 280 ha, jenis ikan perairan umum yang didomestikasi sebesar 2 jenis dari target sebanyak 2 jenis, penebaran benih ikan di perairan umum sebesar 22.522.000 ekor dari target sebesar 12.000.000 ekor dan Plasma Nutfah yang dilestarikan sebesar 4 jenis dari target sebanyak 4 jenis.
- Urusan Pariwisata**, pada Tahun 2017 dilaksanakan melalui Program : (1) Pengembangan Destinasi Wisata yang ditunjukkan oleh event pariwisata yang terdiri dari 4 event/tahun diantaranya *International Surfing Exhibition*, serta peningkatan sarana dan prasarana pariwisata di objek daya tarik wisata, dan peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebanyak 250 orang per tahun; (2) Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang ditunjukkan oleh kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat sebesar lebih dari 2 juta orang dari target 1.5 juta orang, serta kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat sebesar 42,3 juta orang/tahun, kunjungan wisatawan nusantara ke akomodasi di Jawa Barat sebesar 17,4 juta orang/tahun dari target sebesar 16,1 juta orang/tahun, serta penyelenggaraan event promosi kegiatan pariwisata sebesar 9 event per tahun dari target 4 event per tahun.
- Urusan Pertanian**, pada Tahun 2017 ditunjukkan oleh peningkatan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 109,27 poin meningkat dari Tahun 2016 yang mencapai 104,31 poin, menunjukkan terjadinya peningkatan penerimaan dibanding pengeluaran petani. Keberhasilan tersebut dicapai melalui Program : (1) Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan dengan capaian produksi Padi mencapai 12,51 juta ton, produksi Jagung sebanyak 1,43 juta ton, produksi Kedelai sebanyak 56,8 ribu ton, produksi komoditas peternakan meliputi: produksi Daging mencapai 952.463 ton, telur 230.407 ton, dan susu 310.449 ton; (2) Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian /Perkebunan dengan capaian kelembagaan penyuluhan pertanian yang meningkat kapasitasnya sebesar 495 unit dari target 460 unit, dan penyuluh pertanian yang meningkat kesejahteraan & kompetensinya sebesar 2.609 orang/tahun dari target sebesar 2.609/tahun; (3) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman dengan capaian luas serangan 9 OPT Utama sebesar 104.831 ha; (4) Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan dengan capaian kelompok / pelaku penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI tanaman pangan dan hortikultura sebesar 20 kelompok.

- **Urusan Kehutanan**, pada Tahun 2017 dilaksanakan melalui Program : (1) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan capaian peningkatan produksi kayu hasil hutan sebesar 7 persen dari target sebesar 2 persen, hasil hutan bukan kayu dicapai sebesar 2,17 persen dari target sebesar 1 persen, bertambahnya produksi olahan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebesar 1,02 persen dari target sebesar 1 persen, penerimaan jasa wisata alam sebesar 5,02 persen dari target sebesar 5 persen dan hutan rakyat yang dikelola secara lestari sebesar 4 persen dari target sebesar 1 persen; (2) Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan capaian pelaku utama dan pelaku usaha bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya sebesar 35 kelompok dari target sebesar 30 kelompok, serta penyuluh kehutanan yang meningkat kompetensinya sebesar 90 orang. (3) Pengelolaan Kawasan Lindung dengan capaian tutupan lahan yang berfungsi lindung terhadap luas wilayah sebesar 38,52 persen; (4) Penataan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebesar 4 poin dari target sebesar 4 poin, menurunnya gangguan keamanan hutan sebesar 2 persen dari target sebesar 2 persen dan keanekaragaman dan populasi tumbuhan dan satwa liar sebesar 5 persen dari target sebesar 5 persen.
- **Urusan Perdagangan**, pada Tahun 2017 dilaksanakan melalui Program : (1) Perdagangan Dalam Negeri melalui validasi Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan produk bagi konsumen sebanyak 6.831.222 buah, dan untuk meningkatkan kualitas produk melalui verifikasi terhadap produk yang memenuhi kriteria Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sebanyak 3.900 buah serta peningkatan cakupan pengawasan barang beredar sebesar 1,5 persen; (2) Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa ditunjukkan oleh indeks pemberdayaan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa sebesar 37,29 persen dan barang yang diuji sebesar 111 unit; (3) Pengembangan Perdagangan Luar Negeri ditunjukkan oleh peningkatan jumlah eksportir Jawa Barat sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 182 eksportir, dan peningkatan ekspor non migas sampai dengan Tahun 2017 sebesar 14,49 persen.
- **Urusan Perindustrian**, pada Tahun 2017 dilaksanakan melalui Program : (1) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang ditunjukkan oleh nilai produksi industri Tahun 2017 sebesar 7,43 persen dari target 5 persen, lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 5,15 persen; (2) Pengembangan Industri yang ditunjukkan oleh unit usaha industri yang dikembangkan sebanyak 210.809 unit usaha dari target 203.455 unit usaha; (3) Penataan Struktur Industri yang ditunjukkan oleh kemitraan industri dengan Majelis Ulama Indonesia dalam standarisasi produk industri dan Universitas Padjajaran dalam menciptakan wirausaha baru; (4) Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai produksi industri sebesar 13.303 unit dari target 12.000 unit;

Misi Ketiga : "Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik", dilaksanakan melalui :

- **Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**, pada Tahun 2017 dilaksanakan melalui Program : (1) Pendidikan Politik Masyarakat dengan capaian partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilukada sebesar 71,36 persen dari target sebesar 70 persen, indeks demokrasi Indonesia di Jawa Barat sebesar 66,83 poin dan rasio masyarakat Jawa Barat yang memperoleh pendidikan/sosialisasi tentang ideologi dan wawasan kebangsaan sebesar 0,05 persen; (2) Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan capaian penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat sebanyak 730 kasus dari target 913 kasus, penurunan konflik sosial di Jawa Barat sebesar 51 kali dari target sebesar 64 kali; (3) Perlindungan Masyarakat dengan indikator tingkat ancaman keselamatan masyarakat dengan capaian sebanyak 206 kasus dari target 240 kasus, dan indikator penanganan pelanggaran Pro Yustisi Perda dengan capaian sebanyak 25 dari 40 kasus.
- **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan Tahun 2017 yang ditunjukkan oleh akurasi data kependudukan dengan capaian sebesar 98,63 persen dari target 98 persen dan penataan administrasi pencatatan sipil di Jawa Barat dengan capaian sebesar 95,26 persen dari target 95 persen. Keberhasilan tersebut didukung oleh penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Barat, tingkat akurasi kepemilikan KTP elektronik

per satuan penduduk, tingkat akurasi kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun, akurasi data kependudukan di Jawa Barat, jumlah penduduk Jawa Barat (jiwa), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat, pemanfaatan data kependudukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan jumlah pemandatan data kependudukan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

- **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, dilaksanakan melalui Program : (1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dengan capaian tingkat gotong royong masyarakat dalam pembangunan sebesar 100 persen dari target 75 persen, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di perdesaan sebesar 100 persen dari target 75 persen, meningkatnya strata posyandu multifungsi sebesar 100 persen dari target 90 persen; (2) Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dengan capaian desa yang berkinerja baik sebesar 100 persen dari target 65 persen, tingkat kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa sesuai standar baku sebesar 100 persen dari target 80 persen, aparat desa yang berkinerja baik sebesar 100 persen dari target 65 persen; (3) Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dengan capaian tingkat ketersediaan infrastruktur perdesaan sebesar 100 persen dari target 75 persen; (4) Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan dengan rincian jumlah desa yang sudah menerapkan sistem keuangan desa sebesar 100 persen dari target 70 persen, desa yang melaksanakan pemutakhiran data profil desa sebesar 100 persen dari 85 target.
- **Urusan Komunikasi dan Informatika**, dilaksanakan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan keberhasilan ditunjukkan oleh capaian rasio perijinan lembaga penyiaran sebesar 87 persen dari keseluruhan kanal analog yang ada; Status mutu isi siaran lembaga penyiaran sebesar 8,6 persen dari target 8 persen; Peserta pengembangan SDM penyiaran sebanyak 16.528 orang dari target 2.870 orang; Masyarakat melek media penyiaran dan masyarakat yang terpapar diseminasi informasi melalui media sebanyak 35.825 orang dari target 28.800 orang; Indeks keterbukaan informasi publik sebanyak 82,89 poin dari target 80 poin; dan Keterjangkauan akses internet sebanyak 54,12 persen dari target 48 persen.
- **Urusan Kearsipan**, pada Tahun 2017 dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kearsipan dengan capaian pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) arsip dinamis sebesar 17 persen dari target 15 persen.

Misi Keempat : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan” , dilaksanakan melalui :

- **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**, pada Tahun 2017 dilaksanakan melalui Program : (1) Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan (2) Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang ditunjukkan dengan tingkat kemantapan jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang sebesar 98,17 persen dari target 97,40 persen; (3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang ditunjukkan dengan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan sebesar 75,08 persen dari target 75,0 persen; (4) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya yang ditunjukkan oleh pembangunan daerah irigasi strategis (DI. Caringin) sebesar 20 persen; Tingkat kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi sebesar 73,95 persen dari target 72,0 persen; (5) Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya yang ditunjukkan oleh tingkat daya tampung situ-situ di 2 wilayah sungai kewenangan provinsi sebesar 47 persen dari target 47 persen; (6) Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai yang ditunjukkan oleh tingkat penanganan darurat infrastruktur SDA dan irigasi yang terkena bencana alam sebesar 100 persen dari target 100 persen.
- **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** dilaksanakan melalui Program: (1) Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang ditunjukkan oleh cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 93,12 persen, pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh sebesar 85,02 persen dari target sebesar 84,69 persen, terbangunnya prasarana sarana utilitas pendukung permukiman sebesar 9 unit dari

target 5 unit; (2) Penataan Ruang dengan capaian tingkat kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah mencapai 60 persen dari target 60 persen.

- **Urusan Pertanahan**, pada Tahun 2017 ditunjukkan oleh Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan dengan capaian rekomendasi penyelesaian konflik pertanahan dan permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebesar 100 persen dari target sebesar 100 persen, dan ketersediaan sistem informasi spasial dan non spasial pertanahan Jawa Barat sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen.
- **Urusan Lingkungan Hidup**, keberhasilannya ditunjukkan dengan capaian fungsi kawasan lindung terhadap luas wilayah sebesar 38,52 persen, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 12,56 persen, serta status mutu sungai utama dan waduk besar dengan tingkat cemar sedang sebesar 96,55 persen.
- **Urusan Perhubungan**, capaian keberhasilan pada Tahun 2017 ditunjukkan melalui Program : (1) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang ditunjukkan oleh ketersediaan prasarana transportasi udara (penyusunan dokumen perencanaan BIJB, pembebasan lahan BIJB dan pengembangan nusawiru) sebesar 55,56 persen dari target 49,41 persen, ketersediaan prasarana transportasi laut dan ASDP (penyusunan dokumen perencanaan laut dan ASDP, pembebasan lahan pelabuhan laut pengumpan regional di Pelabuhan Ratu, pengembangan laut dan ASDP) sebesar 62,42 persen dari target 62,36 persen, (2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang ditunjukkan oleh ketersediaan fasilitas sebesar 26,78 persen dari target 26,73 persen; (3) Peningkatan Pelayanan Angkutan yang ditunjukkan oleh jaringan trayek AKDP yang terevaluasi di Jawa Barat sebesar 8,38 persen dari target 4,59 persen, kepemilikan armada angkutan umum AKDP perseorangan menjadi berbadan hukum sebesar 79,17 persen dari target 75,05 persen, ketersediaan terminal tipe B yang memenuhi standar sebesar 55,67 persen dari target 50 persen; (4) Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas yang ditunjukkan dengan angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan sebesar 45,77 persen dari target 44 persen.
- **Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**, capaian keberhasilan pada Tahun 2017 ditunjukkan dengan Program : (1) Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah dengan capaian kinerja luas zona aman pada cekungan air tanah sebesar 65,68 persen dari target 65,60 persen, usaha pertambangan yang melaksanakan *Good Mining Practice* dengan capaian 65,26 persen dari target 60 persen, tersedianya prasarana air baku bagi masyarakat bersumber dari air tanah dalam di wilayah rawan air sebesar 4 titik sumur bor dari target 5 titik sumur bor; (2) Pembinaan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi dengan capaian rasio elektrifikasi rumah sebesar 99,87 persen dari target 96 persen, derts pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan sebesar 251.586 setara barel minyak dari target 175.000 setara barel minyak.

Misi Kelima : "Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal", dilaksanakan melalui :

- **Urusan Sosial**, sasaran dicapai melalui Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditunjukkan dengan menurunnya indeks Angka Kemiskinan pada Tahun 2017 sebesar 7,83 persen atau turun dari Tahun 2016 yang mencapai 8,77 persen dan meningkatnya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani oleh Pemerintah Jawa Barat sebesar 710.539 orang. Keberhasilan tersebut dicapai melalui Program : (1) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan capaian Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 710.539 orang; (2) Pemberdayaan Sosial dengan capaian tingkat kesejahteraan fakir miskin sebanyak 700 orang dengan tingkat kesejahteraan yang meningkat; (3) Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan capaian semakin terkelola dan terarahnya sumber dana sosial untuk menunjang penanganan PMKS sebesar 150 persen; (4) Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan capaian terlindunginya korban tindak kekerasan dan dapat melanjutkan hidupnya secara normal sebesar 140 orang.

- **Urusan Bidang Ketenagakerjaan** pada Tahun 2017 diwujudkan melalui Program : (1) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang ditunjukkan oleh perwujudan peningkatan kualitas dan produktifitas 1.332 orang tenaga kerja dan pemagangan dalam negeri berbasis pengguna sebanyak 60 orang, dan seleksi pemagangan ke luar negeri/Jepang sebanyak 300 orang; (2) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan yang ditunjukkan oleh penyelesaian kasus hubungan industrial sebesar 87,52 persen dari target sebesar 70 persen, kepesertaan jaminan sosial sebesar 12,63 persen, dan pemeriksaan norma ketenagakerjaan sebesar 6.075 perusahaan dari target 6.000 perusahaan; (3) Peningkatan Kesempatan Kerja yang ditunjukkan oleh penyerapan angkatan kerja melalui sektor primer, sekunder dan tersier sebesar 495.746 orang dari target 487.000 orang; (4) Perlindungan Pekerja Anak yang menunjukkan angka penurunan dari 192.288 orang pada Tahun 2016 menjadi 191.418 orang pada Tahun 2017.
- **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** pada Tahun 2017 dilaksanakan melalui Program : (1) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Tahun 2017 sebesar 71,15 poin; (2) Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Tahun 2017 sebesar 89,56 persen.
- **Urusan Kepemudaan dan Olahraga**, dilaksanakan melalui Program: (1) Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan dengan capaian pemuda berprestasi nasional sebanyak 15 orang dari target 4 orang, pemuda Jawa Barat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan sebesar 450 orang, partisipasi pemuda Jawa Barat dalam Kabiza fest sebanyak 135 orang, pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan pemuda sebanyak 100 orang, fasilitasi organisasi kepemudaan sebanyak 8 organisasi, pelatihan bagi kader organisasi kepemudaan sebesar 85 orang, kader pemuda anti narkoba sebanyak 100 orang.
- **Urusan Kebudayaan**, dilaksanakan melalui Program : (1) Pengembangan Nilai Budaya yang ditunjukkan oleh pengelolaan bahasa, sastra, dan aksara daerah sebanyak tiga pengelola budaya lokal, rekomendasi HKI Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sebanyak 5 rekomendasi; (2) Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya yang ditunjukkan oleh pengelolaan seni dan perfilman daerah sebesar 7 jenis kegiatan, pengusulan HKI Seni Tradisi sebesar 1 rekomendasi.
- **Urusan Perpustakaan**, dilaksanakan Melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan capaian semua jenis perpustakaan yang dibina sebanyak 1.670 unit dari target 1.600 unit.
- **Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan**, dilaksanakan melalui: (1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang ditunjukkan oleh usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat mencapai 80 persen dari target 80 persen; Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi mencapai 85 persen dari target 85 persen; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan mencapai 80 persen dari target 80 persen; Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan mencapai 92,06 persen dari target 90 persen; Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran mencapai 100 persen dari target 90 persen; Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan mencapai 60 persen dari target 60 persen. Keberhasilan tersebut didukung oleh inovasi pengembangan sistem RKPJ Jabar *Online 2101*, pengembangan e-monev, pengelolaan satu data pembangunan Jawa Barat, penyusunan basis data kemiskinan melalui aplikasi Kilometer Nol (KM-0) *Pro Poor*, pembentukan Badan Pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan dan Badan Pengembangan Jawa Barat Bagian Utara; Fasilitasi Pengembangan 3 (tiga) Metropolitan, yaitu: Pengembangan Metropolitan BODEBEKKARPUR, Metropolitan Bandung Raya, Metropolitan Cirebon Raya, dan 3 (tiga) Pusat pertumbuhan (*Growth Centre*) yaitu Pusat Pertumbuhan Pangandaran, Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu, dan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya di Provinsi Jawa Barat, serta penelitian dan pengkajian aspek pembangunan Jawa Barat.

IV. Penghargaan yang Diraih

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017 telah mendapatkan 24 penghargaan dari berbagai bidang pembangunan yang merupakan hasil bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah kabupaten/kota serta seluruh masyarakat Jawa Barat. Adapun penghargaan tersebut yaitu :

- (1) Penghargaan atas Dukungan Penegakkan Hukum Keimigrasian di Bidang Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)Terbanyak Tingkat Provinsi dari Kementerian Hukum dan HAM;
- (2) Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama dari Kementerian Perhubungan;
- (3) Penghargaan atas Prestasi Kinerja Tertinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui LPPD Tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri;
- (4) Penghargaan Golden Awards Siwo PWI Pusat dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga;;
- (5) LHP atas LKPD TA 2016 dengan Opini WTP dari BPK;
- (6) Penghargaan Pembina K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (7) Anugerah Kota Layak Anak (Pengembangan Forum Anak Terbaik untuk Wilayah Barat/Provinsi Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (8) Anugerah Penggerak Ekonomi Syariah Dari Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Syariah Indonesia dari Bappenas;
- (9) Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2017 Koran Sindo dari Kementerian Dalam Negeri;
- (10) Anugerah Budhipura Tahun 2017 dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- (11) Penghargaan atas Kemudahan Perizinan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- (12) Penghargaan sebagai Pembina Olah Raga Berprestasi pada puncak Peringatan Haornas Ke XXXIV Tahun 2017 dari Kementerian Pemuda dan Olah raga;
- (13) Penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai Pemda yang paling sering meraih WTP dari Kementerian Keuangan;
- (14) Anugerah Energi Lestari Kategori Pemerintah Daerah Aktif Mendorong Produksi Pengembangan Energi Terbarukan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (15) Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha Tahun 2016 dan 2017 dari Ditjen Bina Pemberdayaan Desa Kementerian Dalam Negeri;
- (16) Anugerah Kehormatan Sulawesi Selatan dari Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan;
- (17) Anugerah Kihajar 2017 peringkat Madya, atas dedikasinya dalam bidang pengembangan TIK dlm bidang Pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (18) Penghargaan Swasti Saba Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2017 dari Kementerian Kesehatan;
- (19) Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman;
- (20) Penghargaan Paramakarya 2017 dari Kementerian Ketenagakerjaan;
- (21) Penghargaan sebagai Provinsi yang telah menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- (22) Penghargaan Innovative Government Award 2017 dari Kementerian Dalam Negeri;
- (23) Penghargaan Leadership Award 2017 dari Kementerian Dalam Negeri;
- (24) Penghargaan atas Kepatuhan dan Kualitas Tata Kota Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Teladan Nasional dan Anugerah KASN 2017;

V. PENUTUP

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 secara lengkap dapat dilihat pada website www.jabarprov.go.id. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, saran, dan tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dapat disampaikan melalui Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 22 Bandung 40115 tlp (022) 4232448; 4233347; 4230963 Pesawat 308,499, Fax (022) 4203450, e-mail: info@jabarprov.go.id.

Bandung, Maret 2018

GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN